

**PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT DI JALAN DIPONEGORO
KABUPATEN SUMENEP**

***EMPOWERMENT OF STREET VENDORS (PKL) IN IMPROVING THE WELFARE OF
COMMUNITY LIFE ON DIPONEGORO STREETS
SUMENEP DISTRICT***

Oleh :

Irma Noviantika Putri^{1)*}

^{1)*}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

^{1)*}Program Studi Administrasi Publik

¹⁾Universitas wiraraja Madura

irmanoviantika@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mendayagunakan masyarakat yang berorientasi untuk membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat bercirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil pra-survei menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dipenogoro Kabupaten Sumenep. Metode penelitian dekskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Areal Kota Sumenep berdasarkan masalah dan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah yang dilakukan pemerintah dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu melakukan relokasi; pemberian tenda ataupun gerobak; kemudian melakukan penertiban sebagai langkah terakhir bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih membandel tidak mau mengikuti program penataan yang dilakukan Pemerintah. Dampak yang terjadi akibat dari kegiatan pemberdayaan diantaranya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan tenang tanpa adanya ancaman penertiban. Sedangkan dampak bagi Pemerintah adalah dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak retribusi. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu sulitnya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk direlokasi mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang relokasi.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Community empowerment is an effort to utilize society that is oriented towards building an independent society so that community development is characterized by, by and for the community. Based on the pre-survey results, it shows that the majority of street vendors are an economic activity in the form of the informal sector who open their businesses in the field of production and sale of goods and services using relatively little capital and occupying public spaces. The aim of this research is to determine the empowerment carried out by the Sumenep Regency Government towards Street Vendors (PKL) on Jalan Dipenogoro, Sumenep Regency.

Qualitative descriptive research method to answer the problem of how empowerment is carried out by the Sumenep Regency Government towards Street Vendors (PKL) in the Sumenep City Area based on the problem and its potential in improving the welfare of the community. Based on the research results, it is known that the steps taken by the government in the process of empowering Street Vendors (PKL) were carried out in several stages, namely relocating; provision of tents or carts; then carry out control as the final step for Street Vendors (PKL) who are still stubborn and do not want to follow the structuring program carried out by the Government. The impacts that occur as a result of empowerment activities include that street vendors (PKL) can carry out their business activities calmly without any threat of control. Meanwhile, the impact for the Government is that the presence of Street Vendors (PKL) has greatly supported increasing regional income by collecting tax levies. However, the negative impact is that it is difficult for Street Vendors (PKL) to relocate considering the low understanding they have about relocation.

Keywords : Empowerment, Street Vendors (PKL), Community Welfare.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berupaya berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Baik itu melalui sektor formal maupun saktor informal, sektor informal merupakan sektor perekonomian yang tidak atau sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia (Nora Kamelia 2021).

Pada dasarnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial heterogen. Dalam perkembangannya kota dianggap sebagai tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang pindah dari desa ke kota,

keadaan ini menyebabkan perubahan kebiasaan mereka. Mayoritas warga perkotaan menjadi bersifat individualistis dan interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi masyarakat hanya sebatas pada (Sarlito W. Sarwono 2011:221).

Bukanlah suatu hal yang mudah untuk bertahan hidup di tengah situasi yang krisis saat ini, ditambah dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga beberapa kebutuhan pokok sebagai dampak dari naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang mengakibatkan inflasi. Inflasi dimana laju pergerakan harga barang dan jasa kebutuhan hidup melonjak. Inflasi yang berimbas pada setiap sudut kehidupan, banyak bidang usaha yang melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja agar tetap dapat beroperasi. Bahkan beberapa harus menutup usahanya karena tidak lagi mempunyai daya saing. Jika sudah demikian yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran, angkatan kerja yang

tidak memiliki kekayaan dan makin bertambahnya masyarakat miskin (Daipaha 2015).

Keberadaan PKL di mata masyarakat, ada pihak yang pro/mendukung di samping yang kontra/menentang. Pihak yang mendukung memandang dari sudut arti yang positif bahwa PKL dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah, PKL sebagai awal seseorang bekerja, menampakkan sifatnya yang tahan pada masa krisis sekaligus sebagai peluang kerja/memberikan lapangan pekerjaan dari sekian banyak penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha dengan modal sendiri bahkan tanpa modal (uang). Mereka adalah orang-orang yang optimis menatap kehidupan, berjuang memenuhi tuntutan hidup. Oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila Menaker beserta ketua Kadin Pusat telah merencanakan agar PKL dibina bukan dibinasakan, jangan dikejar-kejar, jangan dimatikan karena mereka turut andil membangun lapangan kerja. Melalui PKL konsumen mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya sambil berjalan-jalan. Kebanyakan barang-barang yang dijual PKL adalah barang-barang *conveniences* (berkategori menyenangkan seperti souvenir atau kebutuhan sehari-hari di luar sembako) yang dibeli dengan cara emosional artinya begitu melihat barang langsung timbul keinginan membeli

(Zahrah Ghoniyyah Failina 2023).

Terlepas dari beberapa keunggulan dan permasalahan yang dialami pedagang Kaki Lima sebagaimana dikemukakan di atas, namun hasil pra-survei menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, ternyata memperoleh pendapatan rata-rata pertahun yang tergolong rendah. Indikasi rendahnya tingkat pendapatan mereka dapat ditelusuri melalui kepemilikan rumah tinggal, di mana sebagian besar masih mengontrak rumah, bahkan ada di antara mereka yang masih tinggal di rumah keluarganya (DANIEL W. BROMLEY 2008:175)

Masalah lain menyangkut pendekatan pembinaan yang kurang didukung penataan aturan-aturan untuk melindungi sektor informal. Hal ini menimbulkan kesulitan terhadap pemerintah dalam membina sektor informal, sebab tidak sedikit di kalangan sektor informal yang pesimis dan skeptis dengan setiap program pembinaan dan pengembangan yang diprakarsai pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat (*Community*

Development) telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi, istilah pemberdayaan masyarakat diangkat dari istilah *people empowerment*. Salah satunya menurut Sutrisno dalam Abdurroup (2008:26) pemberdayaan masyarakat yaitu suatu bentuk upaya mendayagunakan masyarakat yang berorientasi untuk membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat bercirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian oleh pemerintah daerah karena setiap apa yang dinikmati oleh masyarakat harus dihasilkan atas usahanya sendiri. Pemberdayaan masyarakat ditujukan agar masyarakat dengan potensi yang dimilikinya mampu melaksanakan kegiatan secara aktif dalam setiap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau pengawasan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik serta masyarakat yang berjiwa mandiri, berswadaya, mampu melakukan inovasi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun usaha sendiri dan memiliki pola pikir yang kreatif.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat dilematis di wilayah kabupaten Sumenep. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam rangka penertiban dan penataan PKL ternyata dirasa belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan hingga saat ini. Penataan terhadap aktivitas PKL oleh pemerintah belum mendapatkan tempat dan perhatian khusus dalam

penataan ruang kawasan perkotaan. Hal tersebut menambah runyam penataan PKL yang semakin hari jumlahnya bertambah. Antisipasi yang cenderung terlambat tersebut menjadikan penataan kota yang seharusnya diatur dan disetting pemerintah menjadi tidak efektif.

Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan PKL dengan melakukan relokasi penyediaan tempat untuk pusat kegiatan PKL, memberikan beberapa fasilitas berupa gerobak, peralatan produksi, dan lain sebagainya. Akan tetapi upaya tersebut tidak sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan oleh para pelaku PKL. Kegagalan pemerintah dalam penataan ruang kota yang terjadi selama ini, karena pemerintah tidak pernah mampu merencanakan ruang kota untuk relokasi penataan ruang kota yang baik. Bagi pemerintah, yang penting sudah diberikan lokasi baru dan retribusi jalan, sedangkan fasilitas yang lain sama sekali tidak diperhatikan sehingga tidak mengherankan kalau PKL kembali lagi ke lokasi mereka yang semula. Di satu sisi, PKL sering kali dianggap mengganggu kegiatan sektor lain seperti kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan, serta fungsi prasarana dan fasilitas publik. Namun di sisi lain, keberadaan PKL sangat membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, sumber penerimaan daerah dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, oleh karenanya

usaha ini perlu dilindungi dan dibina. Melihat keseluruhan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang masalah dan potensi Pedagang Kaki Lima serta Pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Jalan Diponegoro Kabupaten Sumenep”.

2. TINJAUAN TEORITIS

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tambahan referensi dalam penelitian ini, berkaitan dengan pemberdayaan pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dipengoro Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yaitu sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Ervita Putri Makmuri (2018) dengan judul penelitian “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik”. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat PKL

yang berada di Alun-alun Kabupaten Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah berupa inventarisasi data PKL untuk dilakukan pembinaan berupa pemberian fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan penunjang pendapatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nilamsari (2018) dengan penelitian berjudul “Dampak Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak individual adanya relokasi berdampak pada psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial pedagang Kaki Lima. Dampak organisasional yaitu adanya interaksi antar pedagang lebih mudah dan terciptanya rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi. Pemberdayaan yang didapatkan oleh pedagang yaitu peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas bantuan sarana dagang, kelembagaan, promosi dan pembinaan akan tetapi pedagang tidak mendapatkan bantuan terkait fasilitas akses permodalan dan fasilitas peningkatan produksi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafidah (2019) dengan judul penelitian “Strategi

dan Hambatan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan keluarga, dan apa saja kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan yang dilakukan oleh pedagang Kaki Lima adalah menjaga kualitas produk, menetapkan harga produk yang sesuai, melakukan promosi, memilih lokasi strategis, dan memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli dan kendala yang dihadapi oleh PKL adalah lokasi usaha dan akses permodalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Sasongko (2022) dengan judul penelitian “Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Palmerah Jakarta Barat di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini menganalisa serta mendeskripsikan kesejahteraan sosial ekonomi PKL khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Palmerah selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisa yang dilakukan diketahui bahwa terdapat perubahan kesejahteraan sosial PKL pada masa pandemi Covid-19. Perubahan muncul karena adanya kebijakan dan ketetapan dari pemerintah yang bertolak belakang dengan

para PKL dalam mendapatkan penghasilannya melalui berdagang. Sedangkan kesejahteraan ekonomi PKL telah mengalami guncangan dan penurunan usaha perdagangan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Zahrah Ghoniyyah Failina, dkk (2023) dengan penelitian berjudul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Sentra Wisata Kulier Karah Kota Surayaba sebagai upaya meminimalisir pengangguran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surayaba Menciptakan Iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi dari pedagang dengan cara memberikan fasilitas kepada PKL..

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pedagang Kaki Lima yang berada disepanjang Jalan Dipenogoro yang merupakan keterlibatan dan peran serta dari Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Perdagangan kabupaten sumenep. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data pada

penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh pada saat wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara langsung terjun di lapangan. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan cara tidak langsung oleh peneliti dari literatur jurnal ataupun melalui media massa. Triangulasi digunakan untuk menetapkan keabsahan data melalui triangulasi sumber yang diperoleh dari wawancara dan dokumen agar jawaban yang didapatkan lebih jelas. Teknik purposive sampling digunakan dalam menentukan informan. Informan kunci yang dipilih yaitu Kepala Dinas, Kabid Perindustrian dan Perdagangan sedangkan informan pendukung yaitu masyarakat yang merupakan pedagang kaki lima dan masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Sumenep. Model analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman, (1994). Pertama, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kedua, reduksi data menggunakan analisis wacana dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, membuat abstraksi dan menggolongkan data. Ketiga, penyajian data yang merupakan proses mencocokkan persamaan maupun selisih

dari hasil reduksi data temuan yang berdasarkan pada teori dan kajian penelitian terdahulu. Keempat, penarikan kesimpulan yang merupakan hasil yang mewakili keseluruhan isi dari penyajian data yang telah disajikan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemerintah dalam upaya penertiban dan penataan para PKL bukanlah hal mudah, banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam penataan dan relokasi PKL agar dapat tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan dalam pelaksanaan relokasi tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam melakukan penertiban PKL dilakukan secara bertahap.

1. Kecenderungan Primer

Kebijakan dan aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam upaya memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut yaitu melakukan relokasi ke sepanjang Jalan Dipenogoro dimana relokasi tersebut diupayakan semaksimal mungkin tertata meski lokasi tersebut merupakan jalan raya utama menuju Pusat Kota Kabupaten Sumenep. Penataan PKL dilakukan dengan langkah konsep yang strategis diantaranya dengan melakukan kegiatan relokasi, pembangunan selter knock down, pemberian bantuan tenda dan gerobak, serta melakukan penertiban bagi para PKL yang masih membandel dan tidak mau mengikuti

program penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dengan adanya relokasi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut secara otomatis sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalan Dipenogoro tersebut khususnya pada jam kerja atau siang hari. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya aktivitas rutin yang terjadi melewati jalan ini pada siang hari hingga malam hari, sedangkan pada malam hari kemacetan bertambah dengan adanya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati area jalan tersebut.

Proses perkembangan kota yang cukup pesat yang bisa dilihat dari maraknya pembangunan sentra-sentra perdagangan, jasa, industri kecil dan menengah. Pendirian perumahan, pusat perbelanjaan bahkan hotel dalam beberapa tahun ini dan kemungkinan akan tetap berlanjut ke tahun-tahun berikutnya menjadi salah satu indikator pesatnya perkembangan kota Sumenep. Seiring dengan itu juga muncul para pelaku sektor informal yang cukup beragam di dalamnya ikut mewarnai pertumbuhan kota Sumenep yang salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Kecenderungan Sekunder

Proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan pembentukan kelompok kecil berdasarkan minat yang sama dan sukarela dimana para Pedagang Kaki Lima dapat terlihat dalam kebersamaan untuk sama-sama berkembang. Sedangkan dalam

tanggung jawab sebagai warga mereka sudah dikatakan sangat bertanggung jawab dimana dalam kepemimpinannya semua dipegang oleh para Pedagang Kaki Lima sehingga nantinya memiliki semua tanggung jawab setiap kegiatan pemberdayaan yang dilakukan

Pemerintah juga mengadakan suatu pembinaan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKL agar lebih memahami tentang jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi, dapat mengembangkan usahanya, bisa menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri.

Mayoritas Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian tanpa mempertimbangkan tata tertib penataan kota berdasarkan kebijakan pemerintah, sehingga tak jarang keberadaan mereka mengganggu aktifitas orang lain seperti lalu lintas. Namun, keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut memberikan manfaat positif juga baik orang lain dimana orang-orang yang membutuhkan barang-barang dagangan para PKL tersebut dapat diperoleh dengan mudah dan murah.

Terkadang pemahaman para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dengan arah kebijakan pemerintah sering bertolak belakang, dikarenakan kurangnya komunikasi dan sosialisasi antara pedagang dengan para pelaksana kebijakan pemerintah. Banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah dalam proses

pengelolaan dan penataan PKL tersebut. Selain dengan melaksanakan cara-cara yang sudah dibuat, pemerintah juga mengadakan suatu pembinaan dan pemberdayaan yang ditujukan kepada PKL. Pembinaan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada PKL agar lebih memahami tentang jenis usaha yang mereka jalankan agar tidak merugi.

Manfaat dalam proses pemberdayaan ini adalah sebagaimana untuk dapat membantu para pedagang agar dapat berjualan sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga sebagai aset dari pendapatan pemerintah daerah juga pemasukan dari para Pedagang Kaki Lima khususnya di areal kota Sumenep. Sedangkan manfaat untuk pemberdayaan untuk Pedagang Kaki Lima adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan juga untuk dapat memiliki keterampilan dan kecakapan hidup dalam berjualan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Langkah yang dilakukan pemerintah dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu melakukan relokasi apabila tidak tersedia lahan sedangkan jumlah Pedagang

Kaki Lima (PKL) terlalu banyak; pemberian tenda ataupun gerobak apabila lahannya tersedia; kemudian melakukan penertiban sebagai langkah terakhir bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih membandel tidak mau mengikuti program penataan yang dilakukan Pemerintah.

Dampak yang terjadi akibat dari kegiatan pemberdayaan sebagai upaya penataan ataupun relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri, masyarakat maupun Pemerintah diantaranya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan tenang tanpa adanya ancaman penertiban karena sudah mendapatkan kepastian hukum atas kegiatan usaha mereka. Sedangkan dampak bagi Pemerintah dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disini adalah dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak retribusi. Akan tetapi keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disini juga menimbulkan dampak negatif yaitu sulitnya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk direlokasi mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang relokasi.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu :

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membludak menimbulkan suatu kesan yang negatif sehingga perlu diadakannya suatu sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), serta perlunya sosialisasi mengenai langkah-langkah yang akan diadakan pemerintah untuk menata dan mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, perlu dilakukan suatu pengelolaan mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga dampak yang dirasakan lebih banyak menguntungkan bagi PKL, masyarakat maupun pemerintah. Dalam artian, meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat keberadaan PKL tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurouf. 2008. *Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Gramedia.
- Daipaha, Wiranda. 2015. *Pedagang Kaki Lima*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Daniel w. Bromley. 2008. *Environment and Development Economics*. Artikel 13:563. doi: 10.1017.
- Edi, Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung Rafika Aditama
- Gunawan. 2002. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Membangun Sumber Daya Sosial Profesional*. Jakarta : Bappenas.
- Lexy J. Maleong. 2001. *Metodoogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyanto HR. 2007. *Efek Konservasi Untuk Pengendalian Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mulyono. 2007. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bina Rena Pariwisata
- Nasution, Marihot. 2020. *Ketimpangan antar wilayah & hubungannya dengan belanja pemerintah: studi di indonesia*. Jurnal budget 5(2).
- Nora Kamelia, Jaka Nugraha. 2021. *Peran Sektor Informal Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan*. Journal Of Economics 1:205–21.
- Prijono & Pranarka. 1996. *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sarlito W. Sarwono, Eko A. Meinarno. 2011. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zahrah Ghoniyyah Failina, Agus Widiyarta. 2023. *Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Sentra Sentra Wisata Kuliner Karah Kota Surabaya*. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 12:3.